

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah/ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP/RKPD) sebagai rencana kerja tahunan, yang merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah/ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP/RKPD), maka kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan - Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Dalam penyusunan Renja –SKPD harus tetap memperhatikan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Pada Tahun 2011 merupakan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang belum tersusun, maka sebagai acuan dalam penyusunan Renja –SKPD Tahun 2011 serta untuk menjamin kesinambungan dalam sistem perencanaan pembangunan dan mendukung tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan Kabupaten Wonogiri maka disusun program-program yang subtansinya merupakan program/kegiatan dalam RPJMD Tahun 2006-2010 tahap kelima.

Sedangkan untuk penyusunan Renja-SKPD Tahun 2012 sebagai acuan dalam penyusunannya mengacu pada Penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2015 dan diselaraskan dengan prioritas program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2011-2015 serta dalam RPJMD Tahun 2011-2015.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri memiliki **agenda strategis dan prioritas** dalam Pembangunan Daerah Tahun 2012 yaitu (1). Pembangunan Pelayanan Dasar Masyarakat meliputi penanganan pengangguran, kemiskinan, pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial dan pendidikan, penciptaan hubungan harmonis antar pemeluk agama atau kelompok masyarakat serta perlindungan terhadap perempuan, anak dan remaja; (2). Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah; (3). Pembangunan ekonomi melalui penguatan kemandirian dan peningkatan daya saing ekonomi daerah; (4). Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima meliputi peningkatan pelayanan pemerintahan, pelayanan investasi dan pelayanan masyarakat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri melaksanakan urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang sudah tidak berlaku lagi. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 yang menyatakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota adalah dalam hal (1) menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di Kabupaten/Kota; dan (2) sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan kemampuan masyarakat setempat. Sedangkan untuk pembiayaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (pasal 16, UU No. 52 Tahun 2009).

Sebagai perwujudan dari tanggungjawab Pemerintah Kabupaten tersebut perlu dukungan dari seluruh unsur penentu kebijakan maupun pelaksana kebijakan. Salah satu bentuk kesungguhan dari komitmen terhadap agenda strategis dan prioritas pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagaimana tersebut di atas, maka Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) wajib disusun setiap tahun berjalan.

Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mendapatkan tugas berkenaan dengan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tugas ini sudah barang tentu berkaitan erat dengan agenda strategis dan prioritas dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, terutama terkait erat dengan obyek Pembangunan yaitu Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan serta Perempuan dan Anak yang merupakan faktor penting dalam penyelesaian masalah pembangunan dan penentu masa depan bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat keterkaitannya dari jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antar kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki namun belum menjadikan suatu kekuatan dalam pembangunan karena belum terayomi dan terlindunginya hak-hak perempuan termasuk juga anak. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang lebih tinggi perlu ditunjang dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai, termasuk kebijakan masalah Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Keberhasilan Pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan akan bermuara pada **keseimbangan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan**, serta pada peningkatan kualitas penduduk dan sumber daya manusia. Memasuki era otonomi daerah (UU No. 32 tahun 2004), diharapkan

penanganan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan semakin sistimatis, terorganisir, terkoordinasi dan berkelanjutan sehingga akan dapat dicapai hasil yang lebih optimal dengan prinsip efisien dan efektif.

Kabupaten Wonogiri memiliki luas wilayah 182.236 hektar, terdiri dari tanah produktif (sawah dan tegalan) seluas 98.189 hektar atau 53,88% dan sisanya merupakan tanah untuk bangunan 13,45%, hutan negara 9,55%, hutan rakyat 7,28%, dan lain-lain 15,83%.

Secara administratif, Kabupaten Wonogiri terbagi dalam 25 kecamatan, 251 desa, 43 kelurahan, 2.371 RW dan 6.976 RT .

B. PERMASALAHAN

1. Berdasarkan hasil pendataan KK Miskin dan Penduduk Miskin yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Wonogiri ***jumlah KK Miskin tahun 2009 sebesar 94.514 KK yang merupakan bagian dari 360.380 KK se-Kabupaten Wonogiri atau 26,23 % KK miskin data penduduk miskin tahun 2009 sebesar 326.739 jiwa terdiri dari laki-laki : 159.569, perempuan: 167.175 jiwa yang merupakan bagian dari 1.234.880 jiwa penduduk se Kabupaten Wonogiri tahun 2009.***
2. Data Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri hasil pendataan keluarga Tahun 2010 jumlah KK 327.181 terdiri dari Pra Sejahtera 66.396 KK KS I sebanyak 64.592 KK, KS II sebanyak 89.632 KK, KS III sebanyak 103.092 KK dan KS III + sebanyak 3.469 KK. Jumlah PUS per Desember 2010 sebesar 217.041 yang bukan peserta KB sebanyak 68.46 %, dengan *Unmet Need* relative masih tinggi yaitu 19.294 atau 8,89 % dari PUS yang ada.
3. Walaupun Total Fertility Rate (TFR) yang menunjukkan angka kelahiran total serta pertumbuhan penduduk telah berhasil diturunkan, yang dapat dilihat TFR Tahun 2009 sebesar 1.87 turun menjadi 1.78 pada tahun 2010 (data BKBKSPP Kab. Wonogiri Tahun 2010) namun komposisi penduduk saat ini masih didominasi kelompok penduduk pada usia reproduksi dengan jumlah yang sangat besar,

sehingga dimungkinkan akan terjadi ledakan jumlah kelahiran atau “*baby boom*” yang kedua.

4. Perubahan lingkungan sosial termasuk juga pengaruh informasi global yang dapat mengakibatkan berkembangnya masalah-masalah kesehatan reproduksi yang dihadapi oleh masyarakat seperti masalah pencegahan penyakit menular seksual, kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi yang paripurna, pengetahuan remaja dan keluarganya tentang kesehatan reproduksi remaja, serta meningkatnya ketahanan keluarga agar mampu meningkatkan kemandirian dalam ber-KB.
5. Masih banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 7 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan 85,71 % berupa kasus KDRT dan 13 kasus kekerasan terhadap anak dengan 92,31 % pada kasus kekerasan seksual pada anak perempuan, hal ini perlu adanya penanganan yang optimal.
6. Untuk mempercepat terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera ada berbagai kelompok kegiatan antara lain Kelompok UPPKS sebanyak 3.165, BKB sebanyak 1.633 kelompok, BKR sebanyak 370 kelompok, BKL sebanyak 418 kelompok, BLK sebanyak 174 kelompok. Sedangkan Institusi Masyarakat Pedesaan terdiri dari PPKBD sejumlah 294, Sub PPKBD sejumlah 2.348 dan PKB RT sejumlah 6.965, yang masih banyak memerlukan dukungan untuk operasional pelaksanaan Program KB Nasional di Kabupaten Wonogiri.

Disamping beberapa permasalah tersebut diatas yang perlu ditangani oleh Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri, juga mempunyai tugas dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Wonogiri terutama penekanan pertambahan jumlah kelahiran pada keluarga miskin dan keluarga berpenghasilan rendah disamping tugas pokok dan fungsi SKPD Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 74 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja. Tugas Pokok Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri yaitu : “Melaksanakan penyusunan

dan pelaksanaan daerah di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan pemberdayaan Perempuan.”

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri mempunyai fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program kerja bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan;
3. Pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan lingkup kabupaten;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan;
5. Pelaksanaan kesekretariatan Badan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan ini adalah :

1. Dimilikinya Program Kerja/Teknis yang jelas dan terarah pada Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2012 ;
2. Tersedianya data dan informasi tentang Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2012;
3. Tersedianya data sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan Program Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan;

4. Agar terjalin komunikasi aktif antara Pimpinan, komponen perencana, pelaksana dan pengelola Program Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan.

D. Landasan Hukum.

Yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;

BAB II

TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD

Target Capaian Kinerja merupakan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh SKPD dengan mengacu pada Visi dan Misi yang hendak dicapai oleh SKPD tersebut. Penentuan target capaian kinerja SKPD Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan secara garis besar dijabarkan sebagai berikut :

A. VISI DAN MISI

Agar dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan dapat memberikan manfaat yang tepat dan benar, serta arah yang jelas maka perlu memiliki visi. Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi atau organisasi harus dibawa, agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan kondisi masa depan yang dicita-citakan dan merupakan komitmen bersama tanpa ada paksaan dalam upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan 5 (lima) tahun kedepan . Visi dari Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri dirumuskan sejalan dengan Visi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2015 yang selanjutnya ditetapkan menjadi Visi Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Terwujudnya Pemerintahan Wonogiri yang Kredibel dan Efektif demi Tercapainya Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berakhhlak Mulia, Bebas dari Kemiskinan) yaitu sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA, KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK”.

Misi merupakan tujuan utama kearah mana perencanaan/program Intansi Pemerintah ingin dicapai. Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi SKPD. Untuk mencapai visi tersebut

Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan telah menetapkan misi sebagai berikut :

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi;
2. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta memperkuat kelembagaan dan jejaring program KB;
3. Meningkatkan pengarusutamaan gender, advokasi dan perlindungan anak melalui peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2015 ditempuh dengan memperkuat pembangunan pada 4 (empat) bidang yaitu : (1) Bidang Tata Pemerintahan/Pelayanan Publik; (2) Bidang Sosial-Budaya; (3) Bidang Fisik dan Prasarana; serta (4) Bidang Ekonomi;

Guna memperkuat pembangunan di bidang Sosial-Budaya, maka untuk mewujudkan Misi Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri menetapkan tujuan :

	MISI		TUJUAN
1	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi	1	Terciptanya kesadaran dan budaya masyarakat dalam program KB;
		2	Tercapainya peningkatan pengetahuan remaja tentang KRR dan pentingnya Keluarga Kecil Berkualitas serta peningkatan pendewasaan usia perkawinan

	MISI		TUJUAN
2	Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta memperkuat kelembagaan dan jejaring program KB;	3	Tercapainya ketahanan dan kesejahteraan keluarga
		4	Tercapainya profesionalisme pengelolaan kelembagaan dan Jejaring Program KB
3	Meningkatkan pengarusutamaan gender, advokasi dan perlindungan anak melalui peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan penghapusan diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan dan anak.	5	Tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui perbaikan kualitas/kemampuan (kondisi) dan peran/kedudukan (posisi) perempuan dalam setiap proses pengambilan keputusan di pemerintahan, organisasi sosial dan politik serta perlindungan tindak kekerasan terhadap perempuan.
		6	Tercapainya pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari tindakan diskriminasi, kekerasan dan eksplorasi terhadap anak.

Dari Tujuan tersebut maka dapat ditentukan Sasaran sebagai berikut :

	TUJUAN		SASARAN
1	Terciptanya kesadaran dan budaya masyarakat dalam program KB;	1	Terlayaninya PUS menjadi Peserta KB
		2	Tertatanya Kembali Pengelolaan Program KB ditandai dengan meningkatnya fungsi pengelola Program KB

	TUJUAN		SASARAN
2	Tercapainya peningkatan pengetahuan remaja tentang KRR dan pentingnya Keluarga Kecil Berkualitas serta peningkatan pendewasaan usia perkawinan	1	Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja terhadap program KRR dan menyadari pentingnya Keluarga Kecil berkualitas
		2	Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan
3	Tercapainya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1	Meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku (PSP) masyarakat tentang Ketahanan dan Pemberdayaan keluarga.
		2	Meningkatnya Kemampuan dan Ketrampilan Tenaga Pendamping
4	Tercapainya profesionalisme pengelolaan kelembagaan dan Jejaring Program KB	1	Meningkatnya Pengelolaan Kelembagaan dan Jejaring Program KB melalui : <ul style="list-style-type: none"> - KB Kes Bayangkara - TNI Manunggal KB Kes - Kesatuan Gerak PKK KB Kes - PGRI - Muslimat NU - Saka Kencana
		2	Meningkatnya Pengelolaan Kelembagaan dan Jejaring Program KB melalui Petugas Lini Lapangan dan IMP(PPKBD, Sub. PPKBD, PKB RT).

	TUJUAN		SASARAN
5	Tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui perbaikan kualitas/kemampuan (kondisi) dan peran/kedudukan (posisi) perempuan dalam setiap proses pengambilan keputusan di pemerintahan, organisasi sosial dan politik serta perlindungan tindak kekerasan terhadap perempuan.	1	Meningkatnya ketrampilan dan SDM Perempuan dalam kehidupan kemasyarakatan dan keluarga serta meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap kesetaraan dan keadilan gender.
		2	Meningkatnya penguatan kelembagaan dan sistem data informasi terkait pemberdayaan perempuan.
6	Tercapainya pemehuan hak-hak anak, perlindungan dari tindakan diskriminasi, kekerasan dan eksplorasi terhadap anak.	1	Terlaksananya fasilitasi kebijakan pemenuhan hak-hak anak di berbagai bidang.
		2	Meningkatnya pemahaman tentang perlindungan anak.

Dari Sasaran dapat ditentukan Target Capaian Kinerja sebagai berikut :

C. TARGET CAPAIAN KINERJA

Dari Sasaran tersebut dapat ditentukan Indikator Kinerja yang disusun berdasarkan urusan sebagai berikut :

I. Target Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

1. Terlalayannya PUS menjadi Peserta KB dengan indikator kinerja :

1.1 Terlalayannya peserta KB Baru rata-rata 20.000 per tahun.

- 1.2 Terbinanya peserta KB Aktif rata-rata 80 % terhadap PUS.
- 1.3 Meningkatnya partisipasi pria dalam ber KB menjadi sebesar 1,60 %.
2. Tertatanya Kembali Pengelolaan Program KB ditandai dengan meningkatnya fungsi pengelola Program KB dengan indikator kinerja :
 - 2.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas petugas penyuluhan lapangan KB dengan rasio 1: 2 PLKB/Desa/Kel serta keseluruhannya telah melaksanakan Pelatihan LDU.
 - 2.1 Meningkatnya kualitas Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) pengelola program KB dari kriteria dasar ke kriteria diatasnya per kelompok :
 - PKBRT : 25 Kelompok
 - Sub PPKBD : 25 Kelompok
 - SKDKB : 25 orang
3. Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja terhadap program KRR dan menyadari pentingnya Keluarga Kecil berkualitas dengan indikator kinerja :
 - 3.1 Meningkatnya jumlah remaja yang mengetahui program KRR dan menyadari pentingnya Keluarga Kecil berkualitas sebesar 75 %.
 - 3.2 Terbinanya 28 PIK KRR se Kab. Wonogiri.
4. Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan dengan indikator kinerja :
 - 4.1 Meningkatnya Usia Perkawinan Pertama sebesar 95 % Wanita menikah pertama diatas 20 tahun, Pria diatas 25 tahun.
5. Meningkatnya peranserta masyarakat serta bahan informasi dan pembinaan dalam ketahanan dan pemberdayaan keluarga dengan indikator kinerja :
 - 5.1 Meningkatnya kualitas kelompok kegiatan dari kriteria dasar ke kriteria diatasnya per kelompok :
 - BKB : 25 Kelompok
 - BKR : 25 Kelompok
 - BKL : 25 Kelompok
 - BLK : 25 Kelompok
 - UPPKS : 25 Kelompok

- 5.2 Meningkatnya kualitas Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) pengelola program KB dari kriteria dasar ke kriteria diatasnya per kelompok :
 - PKBRT : 25 Kelompok
 - Sub PPKBD : 25 Kelompok
 - SKDKB : 25 orang
 - 5.3 Meningkatnya peranserta masyarakat dalam mengikuti kegiatan pada kelompok-kelompok kegiatan (UPPKS, BKB, BKR, BKL dan BLK).
 - 5.4 Meningkatnya kualitas data mikro keluarga di 294 Desa/Kelurahan.
 - 5.5 Terpenuhinya kebutuhan Kartu Kembang Anak (KKA) sebanyak 4.200 KKA
 - 5.6 Terpenuhinya Alat Permainan Edukatif (APE) sebanyak 50 set.
 - 5.7 Meningkatnya jumlah anggota kelompok UPPKS yang mengikuti pelatihan usaha ekonomi produktif sebanyak 50 orang
 - 5.8 Meningkatnya jumlah kelompok UPPKS yang mendapatkan Bantuan Modal Usaha sebanyak 125 Kelompok
 - 5.9 Terlaksananya Pengembangan BKB Posyandu Padu di 25 Desa/Kelurahan.
 - 5.10 Meningkatnya % PUS Pra Sejahtera dan KS I anggota kelompok UPPKS yang menjadi Peserta KB sebesar 89,10 %
6. Meningkatnya Kemampuan dan Ketrampilan Tenaga Pendamping dengan indikator kinerja :
 - 6.1 Meningkatnya pengetahuan dan Ketrampilan kader kelompok kegiatan :
 - BKB : 50 orang
 - BKR : 50 orang
 - BKL : 50 orang
 - BLK : 50 orang
 - UPPKS : 50 orang
 - PKBRT : 50 orang

7. Meningkatnya Pengelolaan Kelembagaan dan Jejaring Program KB melalui :
 - KB Kes Bayangkara ;
 - TNI Manunggal KB Kes;
 - Kesatuan Gerak PKK KB Kes, dengan indikator kinerja :
 - PGRI
 - Saka Kencana
- 7.1 Meningkatnya Pengelolaan Kelembagaan dan Jejaring Program KB melalui:
 - KB Kes Bayangkara di 25 Kec
 - TNI Manunggal KB Kes di 25 Kec
 - Kesatuan Gerak PKK KB Kes di 25 Kec
 - Muslimat NU
 - PGRI
 - Saka Kencana
8. Meningkatnya Pengelolaan Kelembagaan dan Jejaring Program KB melalui Petugas Lini Lapangan dan IMP, dengan indikator kinerja :
 - 8.1 Terlaksananya pembinaan petugas SKDKB sebanyak 294 orang
 - 8.2 Meningkatnya pengetahuan dan Ketrampilan kader dalam mengelola kelompok kegiatan :
 - PKBRT : 50 orang
 - Sub PPKBD : 50 orang
 - PPKBD/SKD KB : 294 orang

II. Target Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. Meningkatnya ketrampilan dan SDM Perempuan dalam kehidupan kemasyarakatan dan keluarga serta meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap kesetaraan dan keadilan gender, dengan indikator kinerja :

- 1.1 Meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sejumlah 350 orang;
 - 1.2 Meningkatnya perempuan yang mendapatkan advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender sejumlah 100 orang;
 - 1.3 Tersalurkannya KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui 500 lembar leaflet;
 - 1.4 Meningkatnya organisasi perempuan yang memahami hak-hak azasi perempuan sebanyak 50 orang wakil dari 10 organisasi perempuan;
 - 1.5 Meningkatnya peranserta organisasi perempuan dalam mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui 2 (dua) kegiatan kewanitaan;
 - 1.6 Meningkatnya pemahaman manajemen bagi perempuan dan mengelola usaha sebanyak 30 orang;
 - 1.7 Terselenggaranya pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan sebanyak 1 (satu) kali kegiatan;
 - 1.8 Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi masyarakat di lokasi Desa P2MBG.
2. Meningkatnya penguatan kelembagaan dan sistem data informasi terkait Pemberdayaan Perempuan, dengan indikator kinerja :
 - 2.1 Meningkatnya peranserta Anggota Pokja PUG melalui masukan/pemikiran untuk peningkatan PUG sejumlah 45 orang;
 - 2.2 Meningkatnya peranserta Anggota Focal Point SKPD melalui masukan/pemikiran untuk peningkatan PUG dalam 1 (satu) kali penyelenggaraan rakor;
 - 2.3 Meningkatnya sistem database bidang Pemberdayaan Perempuan melalui 1 (satu) buah aplikasi komputer;
 - 2.4 Meningkatnya pemahaman sistem pencatatan dan pelaporan KDRT melalui 2 (dua) kali sosialisasi;

- 2.5 Meningkatnya kualitas kegiatan pemberdayaan perempuan melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan pada akhir tahun anggaran.
3. Terlaksananya Fasilitasi kebijakan pemenuhan hak anak di berbagai bidang, dengan indikator kinerja :
 - 3.1 Terlaksananya penyelenggaraan Rakor Forum Anak.
 - 3.2 Terfasilitasinya kegiatan Forum Anak.
4. Meningkatnya pemahaman tentang perlindungan anak, dengan indikator kinerja :
 - 4.1 Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 4.2 Terselesaikannya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

BAB III

PRIORITAS PEMBANGUNAN SESUAI URUSAN SKPD

Berdasarkan issu Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 antara lain:

1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Masih perlunya perbaikan di bidang tata kepemerintahan terutama dari aspek manajemen pada perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2. Tuntutan Peningkatan Kualitas Pelayanan publik

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dituntut pelaksanaan pelayanan yang optimal terhadap publik. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah saat ini belum dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang optimal, hal ini karena belum diterapkannya Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain-lain.

3. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Masih adanya ketergantungan terhadap pemerintah pusat sehingga belum sepenuhnya memenuhi amanat Otonomi Daerah yaitu bahwa Pemerintah Daerah harus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat. Penggalian terhadap pendapatan asli daerah belum dapat dilakukan secara optimal sehingga kemandirian daerah belum dapat terwujud.

4. Perhatian terhadap Investasi di Sektor Rii

Belum mantapnya kondisi perekonomian daerah, ditandai dengan rendahnya dukungan investasi swasta bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi juga harus mempertimbangkan pemerataan pendapatan bagi masyarakat, artinya tidak boleh

mengeksplorasi kekayaan/potensi masyarakat hanya untuk keuntungan sekelompok konglomerat. Contoh riil adalah merebaknya pasar modern yang tidak terkendali dikhawatirkan akan menggeser kelangsungan hidup pasar tradisional ataupun pertokoan/ warung masyarakat.

5. Kemiskinan

Kemiskinan terjadi karena rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Wonogiri yang masih rendah di banding dengan rata-rata Jawa Tengah, sementara tingkat inflasi yang masih relatif tinggi sangat memungkinkan terjadinya penurunan terus menerus dalam daya beli masyarakat, sehingga menimbulkan beban berat bagi masyarakat miskin. Langkah preventif dalam bentuk pemberdayaan dan langkah kuratif dalam bentuk jaminan sosial atas kebutuhan dasar mesti dilakukan.

6. Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka yang terus meningkat selain disebabkan oleh dampak berkepanjangan krisis ekonomi dan bencana alam, juga disebabkan oleh rendahnya kualitas angkatan kerja yang tidak mampu bersaing dan tidak mampu menciptakan lapangan kerja mandiri. Peluang usaha pada prinsipnya masih lebar, dibutuhkan kemampuan dan fasilitasi untuk dapat merealisasikannya.

Lapangan kerja yang akan terus bertahan adalah yang memiliki pangsa pasar yang besar dan memiliki daya saing produk, maka penerapan iptek dalam produksi dan bisnis serta peningkatan hubungan antara produsen lokal dengan pasar yang luas harus menjadi perhatian.

7. Pendidikan untuk Kemajuan dan Peningkatan Moralitas

Pendidikan memiliki dua mata pisau, di satu sisi berorientasi pada kecerdasan iptek guna kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan jasmaniah, dan di sisi lain berorientasi pada kecerdasan emosional dan spiritual guna kedamaian hidup, solidaritas dan kepedulian sosial. Penunjang sisi yang pertama adalah adanya kesempatan dalam

memperoleh pendidikan, sarana dan prasarana yang memadai, serta tenaga kependidikan yang berkualitas. Kesempatan yang sama tersebut berlaku baik laki-laki-perempuan, tua-muda, kaya maupun miskin, yang artinya bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Wonogiri, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan gedung dan prasarana lainnya, merupakan contoh riil perhatian pemerintah terhadap pendidikan. Agar pendidikan bisa bermanfaat, kurikulum pendidikan juga harus mempertimbangkan kebutuhan dunia usaha dan spesifikasi potensi setiap pelaku/siswa.

Penunjang sisi yang kedua adalah pembentukan karakter manusia yang berbudi, agar mampu memilih yang baik, menghindari/mencegah perilaku yang salah.

8. Pelayanan Kesehatan

Sebagian target indikator kinerja SPM Kesehatan belum tercapai. Angka kematian bayi dan balita, status Gizi masyarakat, endemi Demam Berdarah, Flu Burung dan Chikungunya, angka kesakitan dan kematian diabetes militus, kardiovaskuler dan keganasan (kanker), kebiasaan merokok serta pola hidup tidak sehat lainnya menjadi sebagian dari masalah yang harus ditangani.

Kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi, jaminan pelayanan kesehatan yang memuaskan bagi semua warga negara. Subsidi silang pun harus disadari oleh semua pengguna layanan kesehatan bahwa tanggung jawab pembangunan tidak hanya pada pemerintah, tetapi seluruh komponen masyarakat/swasta sesuai dengan kemampuannya.

9. Ancaman Kerusakan Lingkungan, Permukiman Tak Sehat, dan Bencana Alam

Menurunnya daya dukung lingkungan, kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya alam adalah akibat dari kurang terkendalinya para pelaku pembangunan (pemerintah, masyarakat maupun swasta) dalam pemanfaatan, penataan serta perhatiannya terhadap dampak yang ditimbulkan. Kesalahan dalam tata guna lahan, bangunan, rumah tidak layak huni, lingkungan pemukiman kumuh utamanya pada kawasan padat,

penghijauan dan resapan air ke tanah serta penertiban perizinan perlu makin diperhatikan.

Dampak dari kesalahan tersebut adalah meningkatnya potensi kerusakan lingkungan dan bencana alam seperti kebakaran multi rumah, banjir karena luapan air selokan/air hujan, longsor dan sebagainya. Kesiagaan Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam (Satkorlak PBA) berikut personel dan sarana-prasarana makin dibutuhkan.

Meningkatnya kepadatan lalu lintas selain meningkatkan polusi udara juga meningkatkan resiko kecelakaan, sehingga pengembangan/ pendayagunaan jalur-jalur alternatif dan rambu-rambu makin diperlukan.

10. Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Belum tergalinya potensi kesenian, tradisi, dan pariwisata sebagai pendukung peningkatan pembangunan. Disamping itu juga sebagai daya tarik pariwisata terdapat pada sisi keunikan/kekhasan, keunggulan budaya, dan pelayanan dengan sarana dan fasilitas yang memadai belum dapat diwujudkan. Dibidang Olahraga sampai saat ini belum berkembang dengan baik serta pemuda sebagai penerus pembangunan merupakan asset bangsa perlu pembinaan sehingga mampu menjadi daya dukung pembangunan dengan mewujudkan kepemudaan yang berkualitas, berprestasi, peduli, kreatif dan inovatif dalam mengambil setiap peluang/kesempatan positif yang ada.

Dari uraian isu strategis daerah Kabupaten Wonogiri tersebut, Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri mengambil strategi untuk ikut menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai berikut :

1. Mengkampanyekan program 2 anak lebih baik, untuk mendorong masyarakat dalam ber KB;
2. Memaksimalkan petugas yang ada melalui peningkatan ketrampilan dan pengetahuan baik petugas lapangan maupun para medis;
3. Melakukan safari program KB pria di 294 Desa/Kelurahan;

4. Meningkatkan kapasitas dan pemahaman remaja dalam reproduksi sehat serta melakukan advokasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam reproduksi sehat remaja;
5. Meningkatkan kapasitas penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas, pembinaan dan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB Mandiri;
6. Meningkatkan partisipasi kelompok Bina Lingkungan Keluarga dan Bina Keluarga Balita serta mengembangkan advokasi dan KIE dalam meningkatkan kualitas keluarga;
7. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga;
8. Pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam berbagai bidang pembangunan;
9. Pemberian peluang sementara (affirmative action) terhadap perempuan dalam upaya mengejar ketinggalan;
10. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki;
11. Harmonisasi peraturan perundang-undangan dan perumusan kebijakan pembangunan yang memiliki perspektif gender;
12. Mengintegrasikan perspektif hak anak dalam setiap kebijakan pembangunan.
13. Memberikan data dan informasi hasil pelaksanaan program yang akurat, valid dan tepat waktu sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan program kedepan.

Dengan melaksanakan 13 (tiga belas) strategi tersebut diatas Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri berperan serta mengatasi permasalahan dari mulai tingkat dasar yaitu mulai dari manusia lahir sampai dengan masyarakat melalui pelaksanaan **2 (dua) Urusan Wajib** yaitu ; Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; serta Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diurutkan sesuai prioritas sebagaimana tersebut dalam lampiran.